



Pengaruh Implementasi Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Indramayu

Nichola Michael Ayatullah¹, Muhammad Nasim Harahap², R.Nasution³

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 Desember 2023
Revised : 27 Desember 2023
Accepted: 01 Januari 2024

The quality of the Financial Statement Performance of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of Indramayu Regency can be influenced by many factors, including good governance and internal control. The more good governance and internal control are implemented, it will improve the quality of the financial statement performance of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of Indramayu Regency. This study aims to determine the effect of good governance and internal control on the quality of financial statement performance of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of Indramayu Regency. The research methods used are descriptive and verifiative methods with a quantitative approach. The sample in this study amounted to 100 respondents. The sampling technique uses probability sampling and stratified sampling. The analysis tool used is path analysis with software tools using SPSS 25. The results showed that the picture for good governance and internal control over the quality of the financial statement performance of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of Indramayu Regency was considered good. Good governance and internal control over the quality of financial statement performance had a significant positive effect of 71.93%, while the influence of other variables that were not studied in this study was 28.07%.

Keywords: *Good Governance, Internal Control, Quality of Financial Statement Performanc*

(*) Corresponding Author: nicholamichael8@gmail.com,

How to Cite: Ayatullah, N. M., Harahap, M. N., & Nasution, R. (2024). Pengaruh Implementasi Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Indramayu. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10469408>

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 “mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan daerah, yang berarti bahwa kebutuhan otonomi daerah harus lebih luas dan lebih diberdayakan untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah”. Kemudian undang-undang tersebut diganti dan dipuncaki dengan peraturan no. 32 Tahun 2004 dan PP No. 33 Tahun 2004.

Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan lembaga instansi pemerintah yaitu pelayanan publik. Dengan menggunakan pelayanan publik yang baik akan beradampak pada seluruh informasi yang akan diberikan dapat diterima keseluruhan kepada masyarakat sehingga tidak banyak terjadi kesalahpahaman antara informasi yang disampaikan. Dalam mewujudkan pelayanan harus ditunjang melalui organisasi atau lembaga pemerintah yang bersifat tegas, baik, teratur serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun saat berjalannya aturan ini terdapat masalah baru yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal mengelola keuangan daerah. Salah satu indikator adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan kepentingan seseorang terhadap politik, bekerja tidak sesuai tugas, pemborosan penggunaan dana oleh sebagian pihak penanggungjawab serta

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah.

Kinerja pegawai pemerintah daerah didefinisikan sebagai gambaran tingkat pelaksanaan melalui suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam perencanaan suatu organisasi dengan tujuan mengembangkan seluruh bidang. Pelayanan dan kinerja publik sangat erat kaitannya. Objektifitas dalam menilai suatu tingkat pencapaian berkaitan dengan tujuan dan realisasi yang dilaksanakan. oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya suatu tujuan atau target pencapaian organisasi akan menghambat seluruh indikator keberhasilan dalam pelayanan publik yang dilakukan. Salah satu kinerja yang sangat penting bagi pelayanan publik yaitu berkaitan dengan implementasi keuangan.

Kinerja keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau staff yang berhubungan dengan transaksi pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan dalam konsepnya terbagi menjadi dua garis besar yaitu pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini pengelaporan keuangan berkaitan dengan informasi-informasi transaksi keuangan yang telat atau sedang dirancang bertujuan mendukung manajemen dalam memutuskan suatu keputusan. Lain halnya dengan pengelolaan keuangan, berkaitan dengan aktivitas yang mengatur dan mengelola alur transaksi keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajemen organisasi publik adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan, prosedur dan sistem informasi yang berfungsi untuk melindungi aset Perusahaan dari kerugian atau korupsi dan untuk menjaga akurasi dan keuang. Pengendalian internal dilakukan disemua sektor untuk menjaga stabilisasi organisasi.

Salah satu tujuan penerapan pengendalian internal adalah untuk memberikan kepercayaan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah menegaskan pelaksanaan kebijakan pengendalian internal No. 60 tahun 2008, yang mengacu pada Committee of Sponsoring Organization (COSO) dan mengatur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

METODE PENELITIAN

Metode untuk melakukan penelitian yang menguraikan sejumlah hubungan variabel, ukuran populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan aspek lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa numerik atau angka-angka dan dipresentasikan dalam perhitungan yang valid. Numerik tersebut berasal dari jawaban responden yang cukup banyak sehingga garus diolah dengan software SPSS.

Populasi yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dengan jumlah SKPD sebanyak 31 yang terdiri dari atas 22 organisasi berbentuk dinas, 5 organisasi berbentuk kantor, dan 4 organisasi berbentuk badan. Dengan total karyawan sebanyak 2.790 orang. Metode yang dipilih penulis yaitu statified sampling pengelompokan sampel dalam kelompok diambil sampel independent.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Indramayu yang berjumlah 2.790 orang dan diperoleh besar sampel sebesar 100 responden. Maka jumlah sampel yang

diambil berdasarkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan rumus slovin

Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Teori	Indikator	Butir Soal
1	Pengaruh Implementasi <i>Good Governance</i> (X1)	Partisipasi <i>Rules of Law</i> Transparansi <i>Responsive Consensus Orientation Equality</i> Efisiensi dan Efektif, Akuntabilitas. <i>Strategic vision</i>	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Keadilan dalam hukum Arus informasi yang bebas Pelayanan terhadap masyarakat Wadah pelayanan masyarakat Perbaikan sistem kesejahteraan dan keadilan Proses keberhasilan sesuai kebutuhan masyarakat Pertanggungjawaban atas sesuatu yang dijalankan	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15,16, 17,18
2	Pengendalian Internal (X2)	Proses Perumusan Strategi Perencanaan Strategik, Penganggaran, Operasional Evaluasi kinerja	Proses dalam penentuan strategi Proses dalam menentukan strategi Penyusunan dana anggaran kegiatan Berjalannya suatu strategi penanggulangan strategi yang sudah dijalankan	1,2,3,4,5
3	Kualitas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Informasi Finansial Informasi Nonfinansial	Informasi yang didapatkan dari anggaran Informasi yang didapatkan dari prespektif kegiatan	1,2,3,4,5, 6,7,8

Skala Likert

Implementasi Good Governance	Pengendalian Internal	Kualitas Kinerja Laporan Keuangan	Skor
X1	X2	Y	
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	5
Setuju	Setuju	Setuju	4
Cukup Setuju	Cukup Setuju	Cukup Setuju	3

Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	2
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	1

Analisis Rentang Skala

Skor Skala	RentangSkala	Deskriptif Skor		
		Implementasi Good Governance	PengendalianInternal	Kualitas Laporan Keuangan Kinerja Keuangan
1	100 - 180	Sangat TidakSetuju	Sangat TidakSetuju	Sangat TidakSetuju
2	180,1 - 260	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
3	260,1 - 340	Cukup Setuju	Cukup Setuju	Cukup Setuju
4	340,1 - 420	Setuju	Setuju	Setuju
5	420,1 - 500	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Makna Analisis Rentang Skala

Skor Skala	RentangSkala	Deskriptif Skor		
		Implementasi Good Governance	PengendalianInternal	Kualitas Laporan Keuangan Kinerja Keuangan
1	100 - 180	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
2	180,1 - 260	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
3	260,1 - 340	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
4	340,1 - 420	Baik	Baik	Baik
5	420,1 - 500	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentasi
1-5 Tahun	34	34%
6-10 Tahun	15	15%
11-15 Tahun	12	12%
16-20 Tahun	15	15%
> 21 Tahun	24	24%
Total	100	100%

menunjukkan bahwa responden sebagian besar pegawai bekerja selama rentang 1-5 Tahun yaitu sebanyak 34 orang atau sekitar 34 %, pegawai bekerja selama rentang 6-10 Tahun yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 15 %, pegawai bekerja selama rentang 11-15 Tahun yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 12 %, pegawai bekerja selama rentang 16-20 Tahun yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 15 %, pegawai bekerja selama lebih dari 21 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 24 %.

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
Laki-Laki	56	56%

Perempuan	44	44%
Total	100%	100%

Dari Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 56 % dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang atau sebesar 44% %. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramyu, mayoritas laki-laki yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 56 %.

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentasi
SMA/SMK	5	5%
DI	1	1%
DII	0	0%
DIII	9	9%
DIV	3	3%
S1	76	76%
S2	6	6%
S3	0	0%
Total	100	100%

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden sebagian besar pegawai yang memiliki Pendidikan terakhir S1 sebanyak 76 orang atau sebesar 76%, Pendidikan terakhir S2 sebanyak 6 orang atau sebesar 6 %, Pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 5 orang atau sebesar 5 %, Pendidikan terakhir DI sebanyak 1 orang atau sebesar 1 %, Pendidikan terakhir DII sebanyak 0 orang atau sebesar 0 %, Pendidikan terakhir DIII sebanyak 9 orang atau sebesar 9 %, Pendidikan terakhir DIV sebanyak 3 orang atau sebesar 3 %, Pendidikan.

Instrumen Penelitian

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Kriteria
Good Government (X1)	X1.1	0,511	0.1966	Valid
	X1.2	0,533	0.1966	Valid
	X1.3	0,669	0.1966	Valid
	X1.4	0,791	0.1966	Valid
	X1.5	0,589	0.1966	Valid
	X1.6	0,654	0.1966	Valid
	X1.7	0,511	0.1966	Valid
	X1.8	0,791	0.1966	Valid
	X1.9	0,646	0.1966	Valid
	X1.10	0,586	0.1966	Valid
	X1.11	0,669	0.1966	Valid
	X1.12	0,613	0.1966	Valid
	X1.13	0,627	0.1966	Valid

	X1.14	0,602	0.1966	Valid
	X1.15	0,623	0.1966	Valid
	X1.16	0,649	0.1966	Valid
	X1.17	0,755	0.1966	Valid
	X1.18	0,627	0.1966	Valid
Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0,793	0.1966	Valid
	X2.2	0,823	0.1966	Valid
	X2.3	0,703	0.1966	Valid
	X2.4	0,728	0.1966	Valid
	X2.5	0,856	0.1966	Valid
Kualitas Kinerja Laporan Keuangan	Y.1	0,808	0.1966	Valid
	Y.2	0,782	0.1966	Valid
	Y.3	0,818	0.1966	Valid
	Y.4	0,761	0.1966	Valid
	Y.5	0,769	0.1966	Valid
	Y.6	0,798	0.1966	Valid
	Y.7	0,788	0.1966	Valid
	Y.8	0,696	0.1966	Valid

Partisipasi Peran Masyarakat

Pendapat Responden	Bobot	Frekuensi	Presentasi Frekuensi
Sangat Tidak Setuju	1	0	0,0%
Tidak Setuju	2	5	5,0%
Cukup Setuju	3	22	22,0%
Setuju	4	45	45,0%
Sangat Setuju	5	28	28,0%
Total		100	100,0%

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai indikator partisipasi peran masyarakat dengan total skor 396 dari 100 responden. Skor tertinggi pada jawaban setuju yaitu dengan persentase sebesar 45% dan skor terendah pada jawaban sangat tidak setuju yaitu dengan persentase 0%.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis terhadap persepsi responden mengenai good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu memberikan nilai capaian sebesar 7.690 atau 85,4% dari skor ideal 9.000 dengan kategori sangat kuat. Dari variabel good governance, responden mempresepsikan untuk subvariabelnya, yaitu partisipasi dengan skor 814 atau 81,4% dengan kategori kuat, kepastian hukum dengan skor 897 atau 89,7% dengan kategori sangat kuat, transparansi dengan skor 864 atau 86,4% dengan kategori sangat kuat, respzonsiveness dengan skor 851 atau 85,1% dengan kategori sangat kuat, consensus orientation dengan skor 825 atau 82,5% dengan kategori kuat, equity dengan skor 887 atau 88,7% dengan kategori sangat kuat, efektifitas dan efisiensi dengan skor 824 atau 82,4% dengan kategori kuat, akuntabilitas dengan skor 857 atau 85,7% dengan kategori sangat kuat, dan strategic vision dengan skor 87,1% dengan kategori sangat kuat. Hal ini memberikan gambaran bahwa good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu sudah baik, oleh karena itu baik untuk dipertahankan dan tetap harus ditingkatkan supaya kebijakan yang dibuat oleh pejabat daerah berfungsi untuk memaksimalkan fungsi dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu.

Uji T

Untuk pengaruh pengendalian internal secara parsial terhadap kinerja laporan keuangan dengan tingkat signifikan (α) = 5%, degree of freedom (df) = (n-k-1) = 100-2 = 97 diperoleh t tabel 1,985. Berdasarkan olah data sebelumnya, menunjukkan bahwa t hitung = 7,143 dengan sig 0,000.

Struktural	Sig.	A	t hitung	t tabel	Kesimpulan
$\rho_{y.x2}$	0,0000	0,05	7,143	1,985	H_0 ditolak

Menunjukkan bahwa nilai sig. 0,000 < α 0,05 dan t hitung 7,143 > t tabel 1,985 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan.

UJI F

Untuk pengaruh good governance dan pengendalian internal secara simultan terhadap kinerja laporan keuangan dengan tingkat signifikan (α) = 5%, degree of freedom (df) = (n-k-1) = 100-2 = 97 diperoleh f tabel 3,090.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1819,364	2	909,682	100,634	,000 ^b
	Residual	876,83	97	9,039		
	Total	2696,194	99			
a. Dependent Variable: Kualitas Kinerja Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance						

Menunjukkan bahwa f hitung = 100,634 dan sig. 0,000. Pengaruh good governance dan pengendalian internal secara simultan terhadap kinerja laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikiut.

Struktural	Sig.	A	f hitung	f tabel	Kesimpulan
$\rho_{yx1.x2}$	0,0000	0,05	100,634	3,090	H_0 ditolak

Menunjukkan bahwa nilai sig. $0.000 < \alpha 0,05$ dan f hitung $100,634 > f$ tabel 3,090 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa good governance dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja laporan keuangan.

- Pengaruh good governance terhadap kinerja laporan keuangan
Pengaruh parsial good governance terhadap kinerja laporan keuangan adalah sebesar 0,327 atau 32,7%. Sedangkan pengaruh langsung good governance terhadap kinerja laporan keuangan sebesar 0,1070 atau sebesar 10,7% dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,1403 atau sebesar 14,03% sehingga mempunyai total pengaruh sebesar 0,2473 atau sebesar 24,73%. Selain itu nilai sig. $(0,000) < \alpha (0,05)$ dan t hitung $(4,049) > t$ tabel $(1,984)$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa good governance secara parsial berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara good governance terhadap kinerja laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Citra (2021) yang berjudul “Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kota Metro, menyatakan bahwa good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPK dan aset Kota Metro.
- Pengaruh Parsial Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Laporan Keuangan
Pengaruh parsial pengendalian internal terhadap kinerja laporan keuangan adalah sebesar 0,576 atau 57,6%. Sedangkan pengaruh langsung pengendalian internal terhadap kinerja laporan keuangan sebesar 0,3317 atau sebesar 33,17% dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,1403 atau sebesar 14,03% sehingga mempunyai total pengaruh sebesar 0,4720 atau sebesar 47,2%. Selain itu nilai sig. $(0,000) < \alpha (0,05)$ dan t hitung $(7,143) > t$ tabel $(1,984)$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara pengendalian internal terhadap kinerja laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka dan Anggie (2021) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel intervening studi pada Pemerintah Daerah Kota Jambi” menyatakan bahwa, Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya setiap peningkatan satu unit dalam sistem pengendalian internal akan mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan.
- Pembahasan Pengaruh Simultan X1 dan X2 Terhadap Y
Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Laporan Keuangan, dengan kriteria uji sig, $(0,000) < (0,05)$ dan f hitung $(100,634) > f$ tabel $(3,089)$ artinya H_0 ditolak. Total pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja laporan keuangan 0,7193. Hal ini menunjukkan bahwa good

governance dan pengendalian internal berkontribusi terhadap kinerja laporan keuangan sebesar 71,93%, sedangkan sisanya 28,07% merupakan kontribusi variabel lain (ϵ) yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Junyantara Putra (2021). berdasarkan hasil uji hipotesis variabel good governance dan pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila good governance dan pengendalian internal diterapkan dengan baik maka akan memaksimalkan kinerja laporan keuangan dengan kebenaran yang dilakukan dilapangan. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu perlu untuk memperhatikan dan meningkatkan good governance dan pengendalian internal sehingga seluruh tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi tepat sasaran dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penilaian dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Citra, Suyanto. 2021. "GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO)." *Jurnal Akuntansi Aktiva* 2(2): 145–52.

Dewi, Ni Putu Icha Vellyana, and I Wayan Pradnyantha Wirasedana. 2021. "The Effect of Human Resources Quality , Good Governance and Internal Control Systems on the Government of Denpasar City Financial Performance." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 5(6): 31–39.

Farida, I, S Mulyani, B Akbar, and S Setyaningsih. 2021. "Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of Financial Information." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26(1): 222–36.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7809941>.

Ferra, Sahala, Arison. 2020. "PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada

BPKPAD Kabupaten Nias Barat) Oleh." *Jurnal Akuntansi Mutiara* 5(1): 1–10.

Ghazalah, Karlina, and Sitti Hartini. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar." *Jurnal Equilibrium* 2(1) kunda, and Juma.

- Herawaty, Netty, and Riski Hernando. 2021. "Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City)." *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business* 4(2): 103.
- I Gede Agus Junyantara Putra, I Putu Gede Samtika. 2021. "E-ISSN 2798-8961 Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2021." *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*: 338–58.
- Ikriyati, Tri, and Nila Aprila. 2019. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma." *Jurnal Akuntansi* 9(2): 131–40.
- Rizka, Anggie, Zamzami. 2021. "THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI* 6(3): 136–48.
- Robbins. 2017. *Organization Behavior Jilid 1*. 13th ed. jakarta: Salemba Empat.
- . 2018. *Organization Behavior Edisi 13*. 1st ed. jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, Mahfudzoh, and OK
- Sofyan Hidayat. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, Dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal MEDIASI* 06(01): 89–100. <http://digilib.unimed.ac.id/28138/>.
- Sri, Ajeng. 2020. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota).